

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurunnya penerimaan negara dari minyak dan pajak minyak pada tahun 1983/1984 yang berdampak pada menurunnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada tahun 1984/1985, maka timbul kesadaran bahwa pemerintah pusat akan mengalami kesulitan keuangan sehingga pemerintah pusat menganjurkan agar pemerintah daerah mulai bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya masing-masing. Mulai saat itu ide untuk mengembangkan otonomi daerah mulai menggema. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Pelayanan publik yang baik dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi suatu daerah. Semua dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dalam

meningkatkan pelayanan kepada publik dengan memfasilitasi serta memberikan belanja yang lebih besar untuk tujuan tersebut agar pertumbuhan ekonomi akan terus lebih membaik.

Menurut Kuncoro dalam Ardhani (2011: 11) bahwa pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ardhani (2011: 11) Menyatakan bahwa pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan, Maka pemerintah daerah diwajibkan untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yakni pendapatan asli daerah (PAD).

Seluruh pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD. Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap

tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2009: 48).

Untuk mensukseskan anggaran pemerintah daerah, Pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang bersumber dari APBN. Salah satunya adalah dana alokasi umum (DAU) yang dapat digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana alokasi umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*Fiscal Gap*) suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*Fiscal Need*) dengan potensi daerah (Darise, 2009: 44).

Salah satu yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat adalah pengalokasian belanja daerah (Renyowijoyo, 2008: 224). Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dengan demikian pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Gorontalo saat ini diarahkan pada upaya meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, yang dibarengi oleh perubahan institusional dan modernisasi serta pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek pemerataan pendapatan (*income*

equity), kesempatan kerja, laju pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi daerah. Investasi pemerintah dapat dicapai melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah serta harapan kebijakan pemerintah pusat akan peningkatan dana perimbangan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Gorontalo bekerja pada sektor pertanian yakni 48,70 %, Mata pencaharian lain yang cukup penting adalah sektor perdagangan 13,19%, Industri Pengolahan 11,15% serta jasa 10.51% (www.melawandotme.com).

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita yang diperoleh setiap tahunnya. PDRB Kabupaten Gorontalo pada tahun 2007 yakni Rp. 1.203.634.000.000 sampai pada tahun 2011 terus mengalami peningkatan yakni mencapai Rp. 2.691.562.000.000. Seharusnya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat ini di dukung oleh belanja modal yang terus meningkat pula.

Dengan belanja modal, daerah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan berbagai fasilitas, yakni dengan memfasilitasi kepentingan publik. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk mampu melaksanakan pembangunannya secara maksimal. Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal Kabupaten Gorontalo selama lima tahun terakhir yaitu periode 2007-2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Rekapitulasi Anggaran Pendapatan, Dana alokasi umum dan Belanja Modal Kabupaten Gorontalo T.A 2007 s/d 2011 (Dalam Rupiah)

N O	TAHUN ANGGARAN	PAD (Rp)	DAU (Rp)	BELANJA MODAL (RP)
1	2007	19,944,692,185.60	335,122,000,000.00	121,912,134,726.00
2	2008	21,505,594,306.35	272,770,367,000.00	139,743,831,643.00
3	2009	23,506,415,983.14	344,628,680,000.00	154,641,472,654.00
4	2010	28,168,601,999.93	338,845,034,000.00	90,837,898,571.47
5	2011	40,183,873,507.90	381,651,947,159.00	113,816,997,711.00

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Gorontalo

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan keadaan belanja modal di Kabupaten Gorontalo masih fluktuatif dan ini salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan belanja modal di Kabupaten Gorontalo. Hal ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo yang terus mengalami peningkatan, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka belanja modal suatu daerahpun akan terus meningkat. Namun kenyataan yang terjadi dalam pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah belanja modalnya yang fluktuatif.

Selain itu pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari suatu daerah. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten

Gorontalo tiap tahunnya mengalami peningkatan namun kenyataan yang terjadi bahwa peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo tidak diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah belanja modalnya yang fluktuatif.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat bahwa dana alokasi umum Kabupaten Gorontalo yang rendah hanya pada tahun 2008 sedangkan tahun lainnya terus mengalami peningkatan. Dana alokasi umum dari pusat digunakan untuk menambah aset tetap pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik, oleh karena itu dana alokasi umum dapat mempengaruhi belanja modal suatu daerah. Dengan demikian dana alokasi umum yang terus meningkat juga akan meningkatkan belanja modal suatu daerah tapi kenyataannya belanja modal kabupaten gorontalo masih fluktuatif.

Sehubungan dengan hal di atas, potensi-potensi yang ada di Kabupaten Gorontalo seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah, agar dana untuk belanja modal dapat terus meningkat. Tujuan peningkatan belanja modal adalah untuk mendorong perekonomian Kabupaten Gorontalo melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian demi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi

belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah, hasil penelitiannya adalah PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ardhani (2011) di pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah, tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal. Dimana hasil penelitiannya adalah pertumbuhan ekonomi dan DAK tidak signifikan terhadap belanja modal sedangkan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal.

Dari penelitian sebelumnya ini penulis tertarik ingin meneliti kembali dengan hanya mengambil beberapa variabel saja yakni variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum serta ingin mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap variabel belanja modal dengan lokasi penelitian yang berbeda yakni pada Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu di atas maka penelitian ingin mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Gorontalo. Untuk itu penulis mengangkat Judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten Gorontalo”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari PDRB perkapita. PDRB Kabupaten Gorontalo pada tahun 2007 yakni Rp. 1.203.634.000.000 sampai tahun 2011 terus mengalami peningkatan yakni mencapai Rp. 2.691.562.000.000, Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat maka belanja modal suatu daerahpun akan terus meningkat. Namun kenyataan yang terjadi di Kabupaten Gorontalo bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah belanja modalnya yang fluktuatif.
2. Investasi pemerintah dapat dicapai melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah serta harapan kebijakan pemerintah pusat akan peningkatan dana perimbangan, sedangkan sebagian besar penduduk Kabupaten Gorontalo bekerja pada sektor pertanian yakni 48,70 %, Mata pencaharian lain yang cukup penting adalah sektor perdagangan 13,19%, Industri Pengolahan 11,15% serta jasa 10.51%. Kondisi ini menjadi beban pemerintah dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
3. Pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mengalokasikan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum belum

dilaksanakan dengan maksimal, hal ini tercermin dari jumlah belanja modal masih fluktuatif sehingga dapat diidentifikasi bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum belum digunakan dengan optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten Gorontalo?
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten Gorontalo?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten Gorontalo?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pada Kabupaten Gorontalo.

2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Kabupaten Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal pada Kabupaten Gorontalo.
4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan dalam pengetahuan dibidang akuntansi sektor publik. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo, terkait dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum serta belanja modal.